

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Stakeholder Theory merupakan salah satu landasan teoritis paling fundamental dalam kajian CSR modern. Teori ini diperkenalkan oleh Freeman (1984) dan berargumen bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua orang yang terpengaruh oleh operasi perusahaan. seperti karyawan, komunitas lokal, konsumen, pemasok, pemerintah, hingga lingkungan. Dalam perspektif ini, perusahaan dipandang sebagai entitas sosial yang keberlanjutannya sangat ditentukan oleh dukungan, penerimaan, dan legitimasi dari para pemangku kepentingan tersebut (Freeman, 1984; Parmar et al., 2020).

Dalam praktik manajemen modern, Stakeholder Theory memposisikan CSR sebagai instrumen strategis yang digunakan perusahaan untuk menyeimbangkan dan memenuhi kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan tersebut. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa aktivitas CSR kini tidak lagi dipahami sebagai tindakan filantropi semata, tetapi telah berevolusi menjadi bagian dari strategi korporasi untuk mengelola hubungan dengan stakeholder serta meningkatkan reputasi, legitimasi, dan kinerja jangka panjang (Harrison et al., 2020; Fernando & Sim, 2021).

Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan sekaligus mekanisme manajemen risiko sosial dan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, temuan empiris juga mendukung relevansi Stakeholder Theory dalam praktik CSR. Penelitian terhadap program “WIKAMengajar” menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi tersebut merancang dan mengimplementasikan program CSR berdasarkan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal, termasuk masyarakat lokal dan institusi pendidikan. Implementasi program ini dibangun atas dasar pemenuhan ekspektasi sosial dan kontribusi nyata terhadap komunitas, sehingga mencerminkan prinsip dasar Stakeholder Theory bahwa keberlanjutan perusahaan bergantung pada hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingannya (Fadilah & Pratama, 2022, STIAMI Online Journal).

Lebih jauh, kajian empiris mutakhir di jurnal internasional menunjukkan bahwa tekanan stakeholder memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi strategi keberlanjutan, inovasi hijau, dan peningkatan kinerja lingkungan maupun sosial perusahaan. Sebagai contoh, penelitian oleh Zhang et al. (2023) di *Journal of Cleaner Production* menemukan bahwa tekanan dari stakeholder termasuk konsumen, pemerintah, dan masyarakat local mendorong perusahaan untuk mengembangkan *green capabilities*, menerapkan teknologi ramah lingkungan, serta meningkatkan kinerja keberlanjutan (*sustainability performance*). Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa perusahaan merespons tuntutan stakeholder melalui program CSR yang lebih terstruktur dan berorientasi keberlanjutan.

Dalam kaitannya dengan SDGs, Stakeholder Theory memberikan rasional yang kuat bahwa perusahaan yang selaras dengan kepentingan dan harapan stakeholder akan lebih terdorong untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki cakupan luas meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan berbagai kelompok stakeholder. Oleh karena itu, integrasi CSR dengan target SDGs dapat dilihat sebagai respons strategis perusahaan untuk mempertahankan legitimasi sosial, meningkatkan hubungan dengan stakeholder, dan memperkuat kinerja keberlanjutan jangka panjang (Pizzi et al., 2021).

Teori stakeholder memandang perusahaan sebagai institusi yang harus mempertimbangkan kepentingan siapa pun yang terkena dampak aktivitasnya tidak hanya pemegang saham (shareholders). Stakeholder mencakup karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat lokal, pemasok, investor, serta lingkungan. CSR dalam perspektif stakeholder berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Perusahaan yang mampu memenuhi harapan stakeholder cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan keberlanjutan bisnis yang lebih stabil

2.1.2 Teori Legitimasi

Legitimacy Theory merupakan salah satu teori utama yang menjelaskan motif perusahaan dalam melakukan dan mengungkapkan praktik Corporate Social Responsibility (CSR). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan sebagai

entitas sosial harus beroperasi sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Legitimasi sosial ini sangat penting karena menentukan keberlangsungan operasional perusahaan, termasuk penerimaan dari masyarakat, kepercayaan investor, dan dukungan regulator (Suchman, 1995; Deegan, 2019).

Dalam perspektif Legitimacy Theory, pelaksanaan dan pengungkapan CSR dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis perusahaan kepada publik untuk menunjukkan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan standar sosial yang dapat diterima. Pengungkapan CSR melalui *annual report*, *sustainability report*, ataupun *ESG disclosure* berfungsi sebagai sarana perusahaan untuk merespons kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*) antara apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang diharapkan masyarakat (Cho et al., 2021). Ketika perusahaan menghadapi tekanan publik atau isu negative misalnya kerusakan lingkungan, konflik sosial, atau ketidakadilan tenaga kerja pengungkapan CSR sering digunakan sebagai alat untuk memulihkan dan menjaga legitimasi tersebut.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan, termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, Indonesia (BEI), memanfaatkan CSR dan laporan keberlanjutan untuk memperoleh dukungan publik dan memitigasi risiko reputasi. Sebagai contoh, studi oleh Sari & Cahyonowati (2021) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat eksposur publik tinggi dan tekanan lingkungan yang kuat cenderung meningkatkan pengungkapan CSR mereka sebagai respons terhadap kebutuhan legitimasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian internasional yang

menunjukkan bahwa keberadaan sustainability report berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang meningkatkan persepsi publik dan stabilitas hubungan dengan stakeholder (Khan et al., 2022; Michelon et al., 2020).

Selain sebagai alat komunikasi, CSR dalam perspektif Legitimacy Theory juga berfungsi sebagai instrumen reputasi untuk membangun citra positif perusahaan. Studi oleh Irwansyah & Kartikasari (2022) menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan CSR untuk memperkuat reputasi, menciptakan kepercayaan, serta memperluas basis legitimasi sosial mereka, terutama pada industri yang memiliki dampak sosial dan lingkungan tinggi seperti manufaktur dan pertambangan. Hal ini membuktikan bahwa legitimasi bukan hanya kebutuhan moral, melainkan juga strategi bisnis.

Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), Legitimacy Theory memberikan dasar yang kuat untuk memahami mengapa perusahaan semakin sering melaporkan kontribusi mereka terhadap target SDGs. Pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai strategi legitimasi, di mana perusahaan ingin menunjukkan bahwa mereka mendukung tujuan global seperti pengurangan kemiskinan, pembangunan industri berkelanjutan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi (pilar *Prosperity*). Penelitian oleh Pizzi et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan SDG reporting sebagai bentuk kredibilitas keberlanjutan untuk menunjukkan keselarasan mereka dengan agenda pembangunan global.

Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, Legitimacy Theory memperkuat argumen bahwa pengungkapan CSR dan kontribusi terhadap SDGs

bukan hanya merupakan wujud kepatuhan normatif, tetapi juga strategi untuk mempertahankan legitimasi sosial dan institusional. Perusahaan industri yang terdaftar di BEI, melalui CSR dan laporan SDGs, berupaya menunjukkan bahwa mereka berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan masyarakat kontemporer.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan “izin sosial” untuk beroperasi. yang didapat melalui kesesuaian antara kegiatan perusahaan dengan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat. CSR menjadi alat komunikasi strategis untuk menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan selaras dengan kepentingan public. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan CSR sebagai medium untuk mengurangi potensi konflik dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat citra positif. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara praktik CSR dan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting).

2.1.3 Triple Bottom Line (TBL)

John Elkington pertama kali menciptakan konsep Triple Bottom Line (TBL) pada tahun 1990 sebagai kritik terhadap paradigma bisnis tradisional yang hanya berfokus pada kinerja finansial (profit). Melalui konsep ini, Elkington menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan output ekonominya, tetapi harus mempertimbangkan dua dimensi tambahan, yaitu people (manusia/sosial) dan planet (lingkungan), yang bersama-sama membentuk tiga pilar keberlanjutan (Elkington, 1999). Dalam perkembangannya, TBL menjadi kerangka fundamental

dalam kajian Corporate Social Responsibility (CSR) dan sustainability karena menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, kontribusi sosial, serta perlindungan lingkungan hidup.

Secara teoretis, TBL memberikan paradigma bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya diukur dari profitabilitas atau peningkatan nilai pemegang saham, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menciptakan nilai sosial dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Literasi kontemporer menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi TBL cenderung mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam proses manajerial, seperti tata kelola lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi penggunaan sumber daya (Rahayu & Hidayat, 2021; Juliano & Rofiaty, 2023). Dengan demikian, TBL menjadi titik temu antara kepentingan bisnis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktik CSR modern, TBL sering dijadikan kerangka konseptual untuk memastikan bahwa aktivitas CSR bukan sekadar aktivitas filantropi yang bersifat jangka pendek, tetapi merupakan strategi keberlanjutan perusahaan (*sustainability strategy*). Penelitian mutakhir menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR berbasis TBL cenderung mendapatkan legitimasi sosial yang lebih kuat serta memperoleh kinerja finansial yang lebih stabil dalam jangka panjang (Shim et al., 2021; Widyatama et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan stakeholder, penguatan reputasi perusahaan, serta penurunan risiko lingkungan dan sosial yang mungkin mengganggu operasional perusahaan.

Studi empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa CSR berbasis TBL memiliki dampak signifikan terhadap tiga aspek pembangunan. Misalnya, penelitian dalam sektor perbankan dan manufaktur menemukan bahwa CSR mengintegrasikan aspek sosial (people), ekonomi (profit), dan lingkungan (planet) berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, penciptaan peluang ekonomi baru, serta pengurangan jejak lingkungan melalui praktik ramah lingkungan (Hilmi et al., 2020; Widyatama et al, 2021). Temuan ini mempertegas bahwa TBL bukan hanya kerangka konseptual, tetapi juga instrumen evaluasi keberhasilan CSR secara holistic.

Seiring penguatan agenda global keberlanjutan, konsep TBL mengalami evolusi dan semakin dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Banyak peneliti menyoroti bahwa TBL dan SDGs memiliki struktur nilai yang sangat kompatibel, terutama pada pilar Prosperity, yang mencakup pertumbuhan ekonomi inklusif, kerja layak, inovasi industri, pengurangan ketimpangan, serta industrialisasi berkelanjutan. Karena itu, TBL kini sering digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis kemampuan CSR dalam mendukung pencapaian target SDGs. Kajian literatur oleh Asmawati & Ningrum (2022) menunjukkan bahwa perusahaan secara bertahap mengalihkan orientasi CSR dari filantropi menuju strategi keberlanjutan yang terintegrasi dengan SDGs.

Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada pengaruh CSR terhadap pencapaian pilar Prosperity SDGs pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI TBL memiliki relevansi teoretis yang sangat kuat. Melalui pendekatan TBL, CSR dapat dianalisis berdasarkan tiga aspek keberlanjutan: kontribusi ekonomi kepada

perusahaan dan masyarakat (profit), peningkatan kesejahteraan sosial (people), dan keberlanjutan lingkungan (planet). Dengan demikian, penggunaan TBL memungkinkan penelitian untuk menilai sejauh mana CSR perusahaan industri tidak hanya meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, kesejahteraan pekerja, daya saing industri, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh SDGs.

2.1.4 Konsep dan Definisi CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep tanggung jawab perusahaan lebih luas daripada sekadar mengejar keuntungan finansial. Dalam paradigma bisnis modern, perusahaan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak boleh mengganggu kenyamanan tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, CSR hadir sebagai bentuk komitmen strategis organisasi untuk mengawasi efek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bertanggung jawab.

Seiring perkembangan global, definisi CSR mengalami pergeseran dari konsep yang awalnya bersifat filantropis menuju pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi dalam proses bisnis. Licandro et al. (2023) menjelaskan bahwa CSR modern mengedepankan penciptaan nilai bersama (shared value) antara perusahaan dan stakeholder melalui praktik yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan, tetapi sebagai bagian yang melekat pada strategi perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus sosial-lingkungan.

Aguinis et al. (2023) menambahkan bahwa CSR telah berevolusi menjadi sebuah filosofi manajemen yang mengintegrasikan prinsip etika ke dalam seluruh operasi perusahaan. Melalui program CSR yang terencana, perusahaan dapat mengurangi eksternalitas negatif seperti pencemaran lingkungan, konflik dengan masyarakat, dan ketidakadilan sosial. Kalra (2024) juga menegaskan bahwa CSR kini menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi perusahaan, meningkatkan citra korporasi, serta memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, CSR juga dipahami sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability values*) dalam tata kelola perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungan, tetapi juga mengimbangi keberlanjutan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan (Asan, 2023). Konsistensi dalam pelaksanaan CSR dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan investor, meningkatkan reputasinya, menumbuhkan kepercayaan publik (Licandro et al., 2023).

Tujuan utama pelaksanaan CSR pada level korporat hari ini umumnya mencakup: (1) memastikan keberlanjutan bisnis (*sustainability*) melalui pengelolaan sumber daya dan risiko yang bertanggung jawab; (2) memperkuat etika bisnis dan tata kelola (*governance*) yang transparan; dan (3) memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui program-program yang terukur dan terlapor. Literatur terbaru menekankan bahwa pengukuran kontribusi terhadap SDGs dan pelaporan yang terstandarisasi (mis.

GRI) memainkan peran kunci agar CSR tidak sekadar wacana tetapi dapat dievaluasi dampaknya (Benoit dan Jean 2023).

Dengan demikian, CSR tidak sekadar anjuran tapi juga cara bisnis perusahaan modern. CSR berfungsi sebagai mekanisme pengurangan risiko, alat peningkatan reputasi, dan sarana untuk membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

2.1.4.1 Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial memiliki 3 dimensi utama berdasarkan Mardikanto (2019), yaitu:

a. Dimensi Ekonomi (Economic Dimension)

Topik ini diartikan sebagai dampak ekonomi dari kegiatan bisnis terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemasok, konsumen, karyawan, dan pihak lainnya.

b. Dimensi Sosial (Social Dimension)

Dimensi sosial ini, dimana perusahaan harus berkontribusi dalam pencapaian kesejahteraan karyawan dan masyarakat. dimensi sosial ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap segala dampak permasalahan sosial yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

c. Dimensi Lingkungan (Environmental Dimension)

Dimensi lingkungan ini, dimana perusahaan membarikan bantuan atas segala dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan dan produksinya terhadap lingkungan. Tujuan dimensi lingkungan adalah agar perusahaan dapat menghilangkan dan

mengendalikan sendiri emisi dan limbahnya serta mengurangi kegiatan yang mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan.

2.1.5 Indikator csr pilar prosperity

1. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan CSR terkait sdgs 8 menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak (decent work). Dalam praktik CSR, perusahaan menerjemahkan tujuan ini menjadi program ketenagakerjaan, pengembangan keterampilan, dukungan UMKM, inklusi tenaga kerja (remaja/wanita/disabilitas), serta kebijakan upah dan keselamatan kerja.

Penelitian Fallah Shayan (2022) menegaskan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan SDGs ke dalam strategi CSR lebih sering melaporkan kontribusi pada SDG-8 sehingga SDG dapat menjadi kerangka ukur yang meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas kegiatan CSR. (Fallah Shayan, 2022). (Hayat, 2024) melaporkan inisiatif CSR yang diarahkan pada pemberdayaan umkm dan pelatihan kerja sebagai kontribusi langsung terhadap SDG-8 temuan ini cocok untuk variabel pengukuran program CSR-UMKM dalam penelitian empiris. (Hayat, 2024).

2. Industri, inovasi dan infrastruktur

Sdgs 9 mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan, infrastruktur yang tahan banting, dan inovasi. Dalam ranah CSR, fokusnya adalah investasi dalam kemampuan teknis masyarakat, pengembangan kapasitas rantai nilai,

serta kolaborasi publik-swasta untuk infrastruktur sosial/ekonomi. Padilla, Lozano & Collazzo (2022) menemukan hubungan kausal antara praktik CSR dan *green innovation* serta kompetitivitas di sektor manufaktur menunjukkan CSR tidak hanya filantropi tetapi juga mendorong kapasitas inovasi (Padilla-Lozano & Collazzo, 2022). Selain itu, meta-analisis oleh Hao (2022) mengindikasikan bahwa kinerja CSR berasosiasi positif dengan jumlah paten/aktivitas inovasi hijau (Hao, 2022),

3. Berkurang Kesenjangan

Dalam tujuan keberlanjutan (sdgs 9) meminta pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara. Dalam konteks CSR, perusahaan berkontribusi melalui kebijakan perekrutan inklusif, remunerasi yang adil, program akses ke layanan dasar (keuangan inklusif, pendidikan kesehatan), dan program pemberdayaan komunitas marjinal. Menurut Chipriyanov et al, (2024) membahas metodologi dan bukti awal mengenai dampak CSR pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan menyimpulkan bahwa CSR, bila terstruktur dan diukur, dapat mendukung SDG-10 melalui intervensi inklusi ekonomi (Chipriyanov et al., 2024).

4. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Sdg12 mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan reduksi limbah, efisiensi sumber daya, circular economy. CSR di sini mencakup desain produk ramah lingkungan, label/traceability, green supply chain management, program daur ulang, dan kampanye edukasi konsumen. Pada penelitiann Le (2023) menunjukkan bahwa CSR mendorong pola produksi & konsumsi

berkelanjutan melalui mekanisme *green supply chain management* (Le, 2023), sedangkan studi yang mengintegrasikan ISO-26000 dan triple bottom line (Dewi & kolega / GrowingScience, 2024) menempatkan SDG-12 sebagai dimensi kunci di mana CSR harus diukur dengan indikator konkret (GrowingScience, 2024). penelitian Raman (2024) juga menegaskan bahwa SDG 12 memiliki keterkaitan kuat dengan praktik CSR seperti circular economy dan pengelolaan rantai pasokan hijau membenarkan penggunaan indikator GSCM, persentase daur ulang, dan procurement hijau.

5. Manfaat Corporate social Responsibility (CSR)

Menurut Mulyani & Hermanto (2018) Praktik dan pengungkapan CSR yang sungguh-sungguh memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain: memperkuat komunikasi pemangku kepentingan, menyelaraskan visi dan prinsip perusahaan, mendorong perbaikan berkelanjutan sebagai manajemen risiko, menjaga reputasi, dan memperoleh keunggulan kompetitif di bidang permodalan, tenaga kerja, pemasok, dan pangsa pasar.

Menurut Khoerunisa (2019), Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memberikan sebuah manfaat bagi perusahaan, seperti:

1. Mampu meningkatkan dan mempertahankan reputasi serta citra perusahaan.
2. Memperoleh persetujuan untuk kegiatan sosial.
3. Mengurangi risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
4. Mengeksplorasi peluang pemasaran yang lebih luas

5. Mampu menekan biaya yang berkaitan dengan dampak pembuangan limbah ataupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan.
6. Meningkatkan hubungan perusahaan dengan pemegang saham, pemasok, dan masyarakat sekitar.
7. Meningkatkan semangat, motivasi, dan produktifitas pada karyawan
8. Berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan.

6. Prinsip Corporate social Responsibility (CSR)

Ada beberapa prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang meliputi:

1. Prinsip keberlanjutan (Sustainability) sesuai dengan penggunaan sumber daya alam oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan ini mempertimbangkan keberadaan sumber daya alam di masa depan dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan.
2. Prinsip akuntabilitas (accountability) berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat secara keseluruhan. Menurut prinsip ini, perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal.
3. Prinsip transparansi (Transparency) adalah prinsip yang menyatakan bahwa segala info terkait dengan kegiatan perusahaan harus dibicarakan baik rinci. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka guna untuk (ketidakseimbangan)

informasi, kesalahpahaman khususnya informasi, dan membuat pihak eksternal bertanggung jawab.

2.2 CSR dalam Konteks Indonesia

2.2.1 Perkembangan Konsep CSR di Indonesia

Tanggung jawab sosial di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, lingkungan, dan ekonomi yang terjadi sejak era 1990-an. Pada masa tersebut, Perusahaan khususnya yang bergerak di sektor dan berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, energi, dan kehutanan menghadapi tekanan sosial yang semakin kuat akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial. Pada fase awal, implementasi CSR cenderung bersifat filantropis, seperti pemberian donasi, bantuan kegiatan sosial, dan pembangunan fasilitas umum. Model filantropi ini bertujuan meredam konflik sosial sekaligus membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat (Gressy & Temy, 2024).

Namun seiring berjalannya waktu, praktik CSR mulai mengalami perubahan paradigmatis. Perubahan ini dipicu oleh meningkatnya tuntutan masyarakat, tekanan dari LSM, perkembangan global mengenai isu keberlanjutan, serta penguatan regulasi oleh pemerintah. CSR tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sukarela yang dilakukan saat perusahaan memiliki surplus dana, melainkan sebagai bagian penting dari strategi bisnis. Perusahaan mulai menyadari bahwa keberlanjutan operasional sangat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan lingkungan sosial dan ekologis. Dengan demikian, CSR di Indonesia berubah menjadi sebuah instrumen strategis yang dapat memperkuat lisensi sosial untuk

beroperasi (social license to operate), meningkatkan reputasi, dan mengurangi risiko operasional (Gressy & Temy, 2024).

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada isu-isu inklusi sosial, peningkatan ekonomi masyarakat, sumber daya alam jangka panjang, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Dengan demikian, CSR diposisikan sebagai kewajiban hukum, tapi penting tanggung jawab korporasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

2.2.2 Regulasi CSR di Indonesia

Regulasi CSR Indonesia yang paling komprehensif di. Berbagai peraturan hukum telah diterbitkan pemerintah untuk pelaksanaan CSR berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Regulasi ini bukan sekedar dasar hukum, tetapi juga mengarahkan ke dalam pembangunan sosial dan lingkungan.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

UU PT menjadi tonggak awal pengaturan CSR secara formal di Indonesia. Pasal 74 mengharuskan bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam untuk bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu perusahaan wajib mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan yang diaudit. Ketentuan ini memperjelas bahwa CSR merupakan kewajiban hukum, bukan sekedar aktivitas sukarela (Gressy & Temy, 2024).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ini menunjukkan bahwa setiap investor, baik dalam maupun luar negeri, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan CSR dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Selain itu, Pasal 15 menegaskan bahwa keberlangsungan investasi harus dievaluasi dari sudut pandang ekonomi serta efeknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Smartid, 2024).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meskipun tidak secara spesifik mengatur CSR, UU ini memperkuat aspek lingkungan dalam praktik tanggung jawab perusahaan. Regulasi ini mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, pengelolaan limbah, mitigasi risiko, dan penegakan ketentuan lingkungan sebagai bagian dari praktik CSR.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

BUMN diwajibkan melaksanakan program tanggung jawab sosial melalui skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

PP ini merupakan aturan turunan Pasal 74 UU PT yang mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan program CSR. Melalui PP ini, perusahaan diwajibkan merencanakan program CSR secara terukur, melibatkan pemangku kepentingan, serta melaporkannya secara periodik.

6. Peraturan OJK (POJK 51/2017)

7. POJK 51/2017 merupakan regulasi penting dalam mendorong praktik keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keberlanjutan serta menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report). Regulasi ini diperkuat oleh SEOJK 16/2021 yang memberikan panduan teknis penyusunan laporan keberlanjutan secara lebih sistematis. Oleh karena itu, keberadaan POJK ini mendorong integrasi isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam operasional perusahaan di Indonesia.

2.3 Standar Pelaporan CSR: Global Reporting Initiative (GRI)

2.3.1 Struktur GRI Standards

Salah satu standar global untuk pelaporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI), termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. GRI membantu organisasi untuk mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan, komparabel, dan konsisten. Versi terbaru GRI Standards (2021) menekankan prinsip materialitas yang berfokus pada isu-isu signifikan bagi perusahaan dan stakeholder. Struktur GRI Standards terdiri dari tiga komponen utama:

1. GRI 1: Foundation

Menjelaskan prinsip dasar pelaporan, definisi, dan pedoman umum untuk memastikan kualitas laporan keberlanjutan.

2. GRI 2: General Disclosures

Mengatur informasi umum tentang organisasi, tata kelola, strategi, etika, integritas, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

3. GRI 3: Material Topics

Mengatur identifikasi isu material, dampak utama, serta pengungkapan yang relevan dengan topik keberlanjutan yang signifikan.

Dengan struktur tersebut, GRI tidak hanya menjadi standar teknis pelaporan, tetapi juga alat strategis yang memandu perusahaan dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam aktivitas operasional.

2.3.2 Keterkaitan GRI dengan SDGs 8, 9, 10, dan 12

GRI Standards memiliki keterkaitan erat dengan SDGs karena indikator-indikatornya memungkinkan perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengungkapkan kontribusi mereka terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.3.2.1 SDG 8 Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

SDG 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif disertai dengan penyediaan pekerjaan layak yang produktif. Dalam sektor industri di Indonesia, hal ini berkaitan erat dengan praktik ketenagakerjaan yang adil, stabilitas kerja, serta kesejahteraan karyawan yang menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kapasitas produktif tenaga kerja nasional.

GRI 401: Employment

memandu pengungkapan terkait aspek ketenagakerjaan seperti tingkat perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan karakteristik ketenagakerjaan yang inklusif. Standar ini membantu perusahaan industri di Indonesia untuk menunjukkan bagaimana mereka menciptakan peluang kerja berkualitas,

mendukung kesejahteraan tenaga kerja, dan mengurangi praktik diskriminatif dalam proses manajemen sumber daya manusia (misalnya melalui kebijakan gaji, tunjangan, dan peluang karier). Melalui pelaporan GRI 401, perusahaan dapat menunjukkan kontribusi nyata terhadap pilar ekonomi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif.

2.3.2.2 SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

SDG 9 mengangkat agenda pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan serta peningkatan inovasi industri. Dalam konteks industri Indonesia, peran sektor-sektor seperti energi, manufaktur, dan bahan dasar sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan pemanfaatan teknologi baru.

GRI 203: Indirect Economic Impacts merupakan standar yang fokus pada pengungkapan dampak ekonomi tidak langsung yang timbul dari aktivitas perusahaan, seperti investasi dalam infrastruktur, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan efek multiplikatif terhadap komunitas sekitarnya. Pelaporan berdasarkan GRI 203 memungkinkan perusahaan industri menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur yang memperkuat basis ekonomi lokal serta inovasi proses industri yang sejalan dengan SDG 9. Di Indonesia, tren pelaporan ini semakin relevan karena perusahaan besar mulai mengintegrasikan SDGs dalam strategi keberlanjutan mereka untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi di mata pemangku kepentingan.

SDG 10 – Reduced Inequalities (Mengurangi Ketimpangan).

SDG 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap peluang. Dalam industri Indonesia, tantangan ketimpangan sering muncul dalam bentuk kesenjangan upah antar wilayah, perbedaan akses terhadap peluang karier, dan rendahnya keberagaman dalam posisi manajerial.

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity memberikan pedoman bagi perusahaan untuk mengungkapkan data keberagaman tenaga kerja dan kebijakan kesetaraan kesempatan. Melalui pengungkapan ini, perusahaan industri dapat menunjukkan tingkat representasi gender, usia, dan kelompok marginal lainnya dalam struktur organisasi mereka. Standar ini penting karena menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 10 di Indonesia.

2.3.2.3 SDG 12 – Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan).

SDG 12 fokus pada manajemen sumber daya dan limbah industri secara berkelanjutan. Industri di Indonesia menghadapi tekanan signifikan untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi, terutama dari sektor-sektor energi dan manufaktur berat.

GRI 306: Waste adalah standar yang mengatur pelaporan mengenai jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan, strategi pengurangan limbah, serta upaya pengelolaan sisa industri. Dengan mengadopsi GRI 306, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana mereka mengoptimalkan penggunaan bahan baku, mengurangi limbah berbahaya, serta menerapkan praktik yang mendukung produksi yang lebih bersih dan efisien. Pelaporan ini tidak hanya sejalan dengan

SDG 12, tetapi juga meningkatkan reputasi keberlanjutan perusahaan di pasar global yang semakin sensitif terhadap isu lingkungan.

Tabel 2.1 Indikator Standar GRI

No	Standar GRI	Uraian GRI	Indikator GRI
1	GRI 401 Kepegawaian	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
		401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada

		401-3	karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu Cuti melahirkan
2	GRI 203 Dampak ekonomi tidak langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
3	GRI 405 Keanekaragaman dan peluang setara	405-1	Keanekaragaman badan tata Kelola dan karyawan
		405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
4.	GRI 306 Limbah	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
		306-2	Manajemen dampak signifikan limbah
		306-3	Timbulan limbah
		306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
		306-5	Limbah yang dialihkan ke pembuangan akhir

--	--	--	--

Sumber: *Global Reporting Initiative*

2.4 Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma pembangunan berkelanjutan telah berkembang di seluruh dunia dan menekankan pentingnya mengintegrasikan elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. WCED (1987) mengatakan tujuan keberlanjutan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Ini dilakukan dalam Laporan Our Common Future. Definisi ini menegaskan pentingnya intergenerasional equity sebagai fondasi utama keberlanjutan. Melalui lensa keberlanjutan modern, pembangunan tidak hanya menekankan peningkatan ekonomi, tetapi juga integrasi nilai sosial seperti keadilan, akses, kesetaraan, serta konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim (Mishra et al., 2024).

Pada periode 2000–2015, dunia internasional mengadopsi *Millennium Development Goals* (MDGs) yang memuat delapan tujuan utama, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, serta kesehatan ibu dan anak. Namun, studi evaluatif UNDP (2022) menyoroti bahwa MDGs masih bersifat sempit karena tidak secara eksplisit memasukkan isu keberlanjutan ekologis, tata kelola global, dan pemerataan antarnegara. Merespons keterbatasan tersebut, pada 2015 PBB meluncurkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 target yang lebih komprehensif. SDGs bersifat universal, integratif, dan melibatkan multi-stakeholder, sehingga menjadi pedoman pembangunan global menuju tahun 2030 dengan pendekatan *leave no one behind*.

2.5 Pilar SDGs

2.5.1 Tiga Pilar SDGs (People, Planet, Profit/Economic)

SDGs mengadopsi prinsip *Triple Bottom Line* (TBL) yang diperkenalkan Elkington (1997), yaitu *People, Planet, dan Profit*. Pilar *People* memfokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pilar *Planet* menekankan perlindungan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pilar *Profit* atau *Economic* mencakup pembangunan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kemiskinan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengadopsi prinsip ini melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs. Novita et al. (2024) menjelaskan bahwa TBL menjadi kerangka dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara efektivitas ekonomi, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui integrasi ini, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.5.2 Transformasi Menjadi Lima Pilar (5P)

Pada 2015, PBB menyempurnakan kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi lima pilar utama (5P), yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership* (UN, 2015). Transformasi ini mencerminkan kesadaran global bahwa keberlanjutan tidak cukup hanya dengan memikirkan aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan, tetapi juga memerlukan sistem sosial-politik yang stabil serta kemitraan global yang kuat.

Pilar *Peace* menyoroti pentingnya tata kelola yang inklusif, stabilitas politik, serta sistem hukum yang adil sebagai fondasi tercapainya pembangunan. Tanpa perdamaian dan pemerintahan yang kuat, program pembangunan berkelanjutan tidak dapat dijalankan secara efektif. Sorooshian (2024) menegaskan bahwa kolaborasi global melalui kemitraan menjadi semakin krusial di era interkoneksi ekonomi dunia, terutama dalam menghadapi tantangan seperti krisis energi, disrupsi rantai pasok, dan perubahan iklim.

Dengan demikian, model 5P memberikan kerangka yang lebih komprehensif, adaptif, dan kolaboratif, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan pembangunan multisector.

2.6 Pilar Prosperity dan Relevansinya dengan SDGs 8, 9, 10, dan 12

2.6.1 Konsep Pilar Prosperity

Pilar *Prosperity* merepresentasikan upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat melalui pertumbuhan yang inklusif, peningkatan produktivitas industri, pemerataan pendapatan, serta pengelolaan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan efektif. Pilar ini terdiri dari sejumlah tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG 8 (pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan layak), SDG 9 (pengembangan industri, inovasi, dan infrastruktur), SDG 10 (pengurangan ketimpangan), dan SDG 12 (pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab).

Menurut Mishra et al. (2024), pilar *Prosperity* bukan hanya mengenai pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang transformasi struktural menuju ekonomi yang resilien, inovatif, dan adil. Pembangunan ekonomi diharuskan tidak hanya meningkatkan PDB, namun juga menjamin akses kesempatan kerja, pemerataan teknologi, serta penggunaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab.

2.6.2 Relevansi dengan Sektor Industri Indonesia

Pilar *Prosperity* sangat relevan dalam konteks industrialisasi Indonesia karena sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDB nasional dan menjadi motor utama transformasi ekonomi. Relevansi keempat SDGs (8, 9, 10, dan 12) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Program MI 4.0 merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mempercepat transformasi digital di sektor industri, terutama pada lima bidang prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia. Asrol et al. (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi otomatisasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan menjadi peluang bagi peningkatan efisiensi produksi dan daya saing global.

Namun, disparitas kesiapan teknologi antara perusahaan besar dan UMKM menghambat pemerataan adopsi industri 4.0. Data Kemenperin (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 21% UMKM manufaktur yang siap menerapkan transformasi digital tingkat menengah. Keterbatasan infrastruktur digital dan modal investasi juga menjadi tantangan utama bagi industri skala kecil dan menengah.

b. SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Transformasi industri menciptakan peluang besar bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Yusuf (2021) menekankan munculnya ancaman *skill mismatch* akibat digitalisasi dan otomatisasi proses produksi. Banyak tenaga kerja yang berisiko tertinggal jika tidak mendapatkan *reskilling* yang memadai. Setelah pandemi COVID-19, sektor industri pulih lebih cepat dibanding sektor lain, namun pemulihan tenaga kerja tidak merata. Data BPS (2022–2024) mencatat bahwa meskipun output industri meningkat, serapan tenaga kerja cenderung stagnan karena perusahaan mengutamakan otomatisasi untuk efisiensi biaya.

c. SDG 10 – Mengurangi Kesenjangan

Modernisasi industri cenderung memperbesar kesenjangan, baik antarwilayah maupun antarsektor usaha. Setyorini (2023) menemukan bahwa perusahaan besar dengan akses teknologi dan modal lebih mampu mentransformasi proses bisnisnya dibanding UMKM. Kesenjangan wilayah juga semakin tampak, di mana 76% industri manufaktur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (Kemenperin, 2023). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan kesempatan ekonomi dan produktivitas antarprovinsi.

d. SDG 12 – Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Indonesia mulai mengadopsi ekonomi sirkular sebagai strategi nasional untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, implementasinya masih bersifat parsial. Fatimah et al. (2020) dan Nasution (2020) mengungkapkan bahwa praktik sirkular di Indonesia masih terfokus pada

pengelolaan limbah dan daur ulang, belum menyentuh aspek *high-value circulation* seperti:

- remanufacturing
- industrial symbiosis
- efisiensi energi dan material
- desain produk berkelanjutan (eco-design)

Padahal, strategi tersebut merupakan komponen penting dalam transisi menuju industri rendah karbon (*low-carbon industry*).

2.7 Hubungan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) pilar Prosperity

Tanggung jawab sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian (SDGs), khususnya pada pilar Prosperity yang berfokus pada upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan industri berkelanjutan, pemerataan kesempatan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pilar Prosperity mencakup tujuan SDGs 8, 9, 10, dan 12, yang masing-masing menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, kesetaraan sosial, serta pengelolaan sumber daya yang efisien.

Melalui pelaksanaan program sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sistematis dan terpadu, CSR membantu perusahaan memperkuat kontribusinya terhadap pilar kemakmuran.. Hoover, Young & Rupp (2025) menjelaskan bahwa CSR merupakan kendaraan utama dalam mempercepat pencapaian SDGs melalui pertumbuhan berbasis inklusi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian Agnihotri & Devi (2024) menegaskan bahwa CSR dapat meningkatkan nilai jangka

panjang dan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses dan kesetaraan.

Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki hubungan yang erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) pilar Prosperity. CSR sebagai variabel independen mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian SDGs pilar Prosperity sebagai variabel dependen karena pelaksanaan CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan hidup. Melalui program CSR, perusahaan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar, menyediakan akses pekerjaan layak, memperluas kesempatan usaha, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Implementasi CSR juga mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya yang berkontribusi pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pelaksanaan CSR dalam operasional perusahaan maka semakin besar kontribusi perusahaan terhadap pencapaian SDGs pilar Prosperity.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi (Tahun)	Metode	Hasil Utama
1	Hoover, Young & Rupp	<i>Corporate Social Responsibility as a Vehicle for Progress Toward the SDGs</i>	Oxford Univ. Press (2025)	Konseptual	CSR mendukung pilar Prosperity melalui pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan praktik inklusif.
2	Syafrizal Thaher	<i>Analisa Keselarasan Program CSR dengan SDGs di Indragiri Hilir</i>	Selodang Mayang (2018)	Deskriptif	CSR selaras dengan indikator SDGs dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3	Agnihotri & Devi	<i>The Role of CSR in Achieving SDGs</i>	ShodhKosh (2024)	Literatur review	CSR meningkatkan nilai jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan;

					risiko greenwashing masih menjadi tantangan.
4	Menaga & Vasantha	<i>Role of CSR in Achieving SDGs</i>	CRC Press (2023)	Konseptual	CSR mendukung Prosperity melalui penciptaan kerja, praktik ketenagakerjaan, dan efisiensi energi.
5	Komariah & Sujatnika	<i>CSR and Community Welfare toward SDGs</i>	An-Nuha (2024)	Deskriptif	CSR meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat.
6	Komariah & Sujatnika	<i>CSR and SDGs</i>	An-Nuha (2024)	Deskriptif	Kolaborasi CSR dan masyarakat memperkuat kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
7	Komariah & Sujatnika	<i>CSR and Sustainable Development Goals</i>	An-Nuha (2024)	Deskriptif	CSR meningkatkan program inovatif, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
8	Joshep Marua	<i>CSR and SDGs: Bibliometric Analysis</i>	Research Square (2025)	Bibliometrik	CSR berkorelasi kuat dengan SDG 8 & 12; perlu penelitian

					lanjutan terkait governance digital dan circular economy.
9	Dasom Lee	<i>CSR and SDG 9</i>	Springer (2021)	Konseptual	CSR mendukung keberlanjutan industri, inovasi, dan ketahanan infrastruktur.
10	Hasanah, Harmain & Syakir	<i>Impact of CSR on Sustainable Development (BSI Medan)</i>	JSWSE (2025)	Kuantitatif	CSR berpengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan; partisipasi masyarakat sebagai mediator.
11	Vargas-Merino & Rios-Lama	<i>Interplay of CSR and SDGs</i>	IBIMA Business Review (2023)	Literatur review	CSR memperkuat pencapaian SDGs melalui tata kelola, etika, dan implementasi keberlanjutan.
12	Perumandla et al.	<i>SDGs Through ESG, CSR, SRI and GF Framework</i>	Benchmarking (2025)	Topic modelling	Integrasi ESG–CSR mempercepat pencapaian SDGs dan meningkatkan nilai Prosperity.
13	Abhishek et al.	<i>Contribution of CSR for</i>	Springer (2024)	Studi kasus	CSR meningkatkan indikator pembangunan

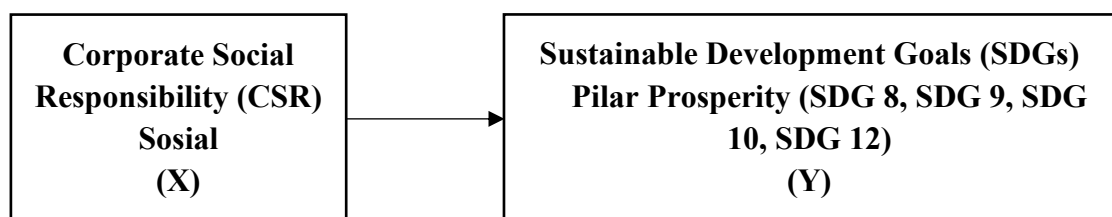
		<i>Attainment of SDGs</i>			ekonomi dan sosial di negara berkembang.
14	Gupta & Prakash	<i>Aligning CSR with SDGs: BSE30</i>	Economic Sciences (2025)	Regresi	CSR berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs; pengungkapan CSR memperkuat kinerja keberlanjutan.
15	ElAlfy et al.	<i>Evolution of CSR Research in the SDGs Era</i>	Sustainability (2020)	Scoping review	CSR menjadi pendorong utama SDGs terutama Prosperity & konsumsi berkelanjutan.
16	Haijian Li & Shuang Du	<i>CSR and Common Prosperity</i>	— (2022)	Teoritis	CSR berhubungan positif dengan pemerataan dan kemakmuran bersama.
17	Nguyen et al.	<i>CSR Disclosure and SDGs Disclosure</i>	HCMCOU Journal (2025)	Kuantitatif	Pengungkapan CSR berkorelasi signifikan dengan pengungkapan SDGs.
18	Sumona Ghosh	<i>CSR and SDGs: Study of Companies in India</i>	Edward Elgar (2023)	Studi komparatif	CSR meningkatkan pembangunan berkelanjutan dalam

					perusahaan berskala besar.
19	Setya Atikatur Nabilah	<i>CSR and Sustainable Development: Literature Review</i>	GDPU-CSB (2025)	Literature review	CSR memiliki kontribusi kuat terhadap hampir seluruh SDGs, terutama Prosperity & Responsible Consumption.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk menjelaskan pola hubungan secara teoretis antara Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel bebas dan Sustainable Development Goals (SDGs) pilar *Prosperity* sebagai variabel terikat. Penyusunan model kerangka pemikiran ini didasarkan pada kajian teori, ketentuan peraturan, serta hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR secara optimal mampu mendorong peningkatan pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek kemakmuran ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kebijakan perusahaan untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi yang seimbang melalui kegiatan yang dirasakan bagi masyarakat dan lingkungan. Fallah Shayan et al. (2022), penerapan CSR dalam kerangka SDGs memberikan arah sistematis bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan sosial dan lingkungan dengan tujuan pembangunan global. CSR yang terintegrasi dengan SDGs memungkinkan perusahaan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas sekitar.

Selanjutnya, Lu dkk. (2021) mengemukakan bahwa CSR berfungsi sebagai mekanisme evaluatif terhadap dampak sosial industri terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui kerangka SDGs, perusahaan dapat mengukur kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa CSR yang berorientasi sosial memperkuat legitimasi industri di mata publik dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian oleh Mishra (2021) juga menekankan pentingnya manajemen CSR secara sistematis dalam mendukung climate action dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks industri di India, CSR terbukti meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat daya saing perusahaan melalui penciptaan nilai bersama antara bisnis dan masyarakat. Implementasi CSR sosial yang strategis membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan

sosial. Dari sisi evolusi konseptual, ElAlfy et al. (2020) mengungkapkan bahwa pergeseran paradigma CSR di era SDGs membawa perubahan dalam orientasi industri dari sekadar kepatuhan hukum menuju penciptaan nilai sosial ekonomi jangka panjang.

Menurut ElAlfy et al. (2020) pendekatan CSR dalam konteks SDGs menegaskan pentingnya integrasi antara tanggung jawab sosial dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus CSR mereka, mengalami peningkatan kinerja ekonomi jangka panjang melalui hubungan sosial yang lebih harmonis dengan pemangku kepentingan. CSR sosial terbukti memperkuat daya saing industri dengan menciptakan nilai tambah yang berbasis keberlanjutan, sesuai dengan tujuan SDGs pilar Prosperity.

Studi lanjutan oleh Mishra (2021) Prosperity karena perusahaan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan komunitas sekitar. Penelitian ini menegaskan bahwa CSR sosial tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian Fallah Shayan et al. (2022) mengonfirmasi bahwa CSR sosial merupakan fondasi penting bagi sektor industri untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. CSR yang diorientasikan pada SDGs Prosperity membantu perusahaan memperluas inovasi inklusif dan menciptakan peluang kerja layak bagi masyarakat sekitar. Studi ini juga menyoroti bahwa strategi CSR yang efektif mampu menarik investasi berkelanjutan, sehingga memperkuat daya saing industri di pasar global.

Dalam konteks empiris terkini, Ashurov & Musse (2024) meneliti hubungan CSR dan pembangunan sosial-ekonomi di negara berkembang, menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki efek langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi.

CSR sosial yang mencakup pendidikan, inklusi sosial, dan pelatihan tenaga kerja meningkatkan produktivitas industri, yang berkontribusi pada pencapaian SDGs pilar Prosperity. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: hipotesis “CSR sosial berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs pilar Prosperity pada sektor industri”

H1: Corporate Social Responsibility (CSR) sosial berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan Sustainable Development Goals khusus pilar prosperity